

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu, tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik baik pada sektor pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah pun kian menguat. Akuntabilitas adalah jenis pertanggungjawaban atas kebijakan dan kegiatan organisasi yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui proses pertanggungjawaban yang dilakukan secara teratur (Mardiasmo,2002).

Pemerintah bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan, yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan organisasi. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan tersebut. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. Pelaporan keuangan itu sendiri harus dilakukan secara tepat, jelas, dan terukur.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang situasi keuangan organisasi dan semua transaksinya selama periode waktu tertentu. Pengguna laporan keuangan diharapkan dapat menggunakan informasi dalam laporan tersebut untuk mengevaluasi akuntabilitas dan sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan, pemerintah perlu memperhatikan data yang disajikan dalam dalam laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sebuah standar akuntansi untuk pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemetintah Republik Indonesia. Laporan keuangan selanjutnya harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, SAP dijelaskan dalam bentuk

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang disusun dengan menggunakan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan disertai dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi mengakui transaksi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan atas dasar basis kas, sedangkan aset, kewajiban, dan dana ekuitas diakui atas dasar basis akrual. Kemudian, Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual sampai basis akrual hadir sebagai pembaharu dan pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah, prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan tersebut akan dilaporkan ke DPR/DPRD dan dipublikasikan untuk diakses oleh masyarakat. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah semua komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 (Purba,2007).

Ikatan Akuntan Indonesia pun telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih maju dan juga profesional setelah melalui beberapa tahap revisi dan perbaikan seiring dengan berkembangnya akuntansi itu sendiri, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pengkajian SAP tidak mungkin terhindar dari perbandingannya terhadap SAK. SAP memiliki beberapa kelemahan. Namun kelemahan itu dapat diperbaiki dengan membandingkannya dengan SAK. Namun perbandingannya tidak kaku karena terdapat perbedaan dalam pemakaian keduanya. Sejauh mana keduanya mampu menjadi pedoman yang baik bagi masing-masing penggunaannya merupakan hal yang sebaiknya menjadi fokus dari perbandingan itu.

Untuk menilai akuntabilitas dan transparansi serta mengambil keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, pengguna laporan keuangan tentu saja membutuhkan informasi keuangan yang lebih berkualitas baik, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tantangan yang baru pun diberikan oleh Laporan Keuangan yang berbasis standar akuntansi kepada

pengawas keuangan daerah dalam upaya meningkatkan aspek pengawasan atas kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangannya adalah sejauh mana pengawas memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kewajaran dari penyajian laporan keuangan dan kemampuan ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah harus memiliki karakteristik-karakteristik yang telah ditetapkan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam SAP harus diikuti saat menyiapkan laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas baik.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik oleh pemerintah akan pula menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik. Pengawasan yang maksimal dan optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah tentu akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara tepat dan wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas pun dapat menjadi ukuran akuntabilitas dan transparansi pemerintah itu sendiri.

Meskipun berbagai perundangan dan peraturan mengenai pengelolaan laporan keuangan telah memadai, pelaksanaan pengelolaan keuangan masih rentan terhadap sejumlah penyimpangan. Penerapan sistem keuangan sendiri tidak lepas dari aparaturnya itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti melakukan sebuah penelitian untuk menelaah sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terealisasi pada instansi pemerintahan di Indonesia khususnya pada Pemerintah Kabupaten Ngada. Penulis kemudian memilih judul “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGADA” sebagai bahan penelitiannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut.

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada.
2. Apakah Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui Apakah Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada Sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ngada.

### **b. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan literature tambahan yang juga dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan dalam proses analisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian

mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.